



Pemkot Optimalkan Layanan Publik Melalui MPP dan JSS

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota Yogyakarta terus berupaya mengoptimalkan layanan publik kepada masyarakat. Selain menghadirkan Mall Pelayanan Publik (MPP) yang bisa diakses secara luring, Pemkot Yogyakarta juga telah meluncurkan aplikasi *Jogja Smart Service* (JSS).

Kabid PPM Bappeda Kota Yogyakarta, Agus Salim, mengatakan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab menyediakan layanan publik bagi masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, sosial, perumahan, dan lain-lain. Mall Pelayanan Publik (MPP) dan JSS menjadi *one stop service solution* bagi masyarakat karena banyak layanan bisa diakses dalam satu tempat.

"Kami juga berkolaborasi dengan pihak lain, seperti kepolisian misalnya untuk layanan SIM, dan lainnya. Jadi MPP itu seperti payung layanan, ketika masyarakat memerlukan layanan dan harus berpindah loket, bisa dilayani dalam satu ruang spasial," katanya, Kamis (27/6).

"Digitalisasi layanan juga kami lakukan dengan JSS, itu super apps semua layanan ada di sana. Banyak inovasi yang kami hadirkan untuk memudahkan masyarakat yang membutuhkan layanan. Untuk JSS ini bisa diakses secara daring, sehingga masyarakat memiliki opsi, baik secara offline atau *online*," sambungnya.

Ia melanjutkan, sejatinya layanan melalui JSS lebih cepat. Sebab, *response time* petugas maksimal 2x24 jam. Karena melalui JSS otomatis akan terintegrasi pada OPD terkait. Ketika keluhan masyarakat tidak tertangani, maka akan muncul no-



TRIBUN JOGJA/CHRISTI MAHATMA

DISKUSI - Anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, Yustinus Kelik Mulyono (kiri) dan Kabid PPM Bappeda Kota Yogyakarta, Agus Salim (tengah) dalam Obrolan Tugu DPRD Kota Yogyakarta, Kamis (27/6).

tifikasi di OPD tersebut.

Pemerintah Kota Yogyakarta terus berupaya agar seluruh layanan publik mudah diakses oleh masyarakat. Masing-masing OPD pun memiliki kiat tersendiri untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, Yustinus Kelik Mulyono mengakui Pemkot Yogyakarta sudah berupaya maksimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun ia mengakui, masih ada layanan-layanan yang belum optimal.

Sebagai legislatif, pihaknya pun berupaya agar layanan kepada masyarakat berjalan optimal. Salah satunya dengan memberikan dukungan anggaran kepada OPD-OPD. "Kami selalu mensupport anggaran untuk OPD. Kalau memang itu untuk kepentingan masyarakat, ti-

dak mungkin kami menolak. Tetapi kan yang perlu digaris bawahi ada anggarannya atau tidak. Kadang masyarakat tidak paham, ketika ingin sesuatu harus segera, padahal anggarannya tidak ada. Kalau anggarannya memang mencukupi, yang menjadi kebutuhan masyarakat pasti kami dukung," paparnya.

Di sisi lain, pihaknya juga menjangkir aspirasi masyarakat melalui *reses*. Tujuannya, agar masukan-masukan dari masyarakat bisa diteruskan kepada OPD terkait. "Dalam *reses* itu juga kami mengukur, apakah masyarakat sudah puas atau kurang puas. Masukan-masukan dari masyarakat ini kami teruskan ke OPD, supaya ada tindak lanjutnya. Namun yang pasti, harus ada komitmen yang kuat dari birokrat untuk memberikan layanan publik yang optimal kepada masyarakat," imbuhnya. **(maw/ord)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005